BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Kota Cimahi mulai melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan dengan mengacu kepada SAP. Laporan keuangan yang wajib disusun terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dimana pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukan ketaatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang disusun secara sistematis untuk satu periode. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

APBD yang dianggarkan pada awal tahun yang bersangkutan kadang kala tidak sesuai dengan realisasi yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh faktor teknis yang dapat

terjadi diluar rencana dan dugaan. Seperti halnya kematian, bencana alam, naik turunnya harga, dan lain-lain.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD, yang menggambaran perbandingan antara realisasi dan anggaranya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. LRA disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan LRA tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dalam satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

1. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun
2. Fakta bahwa jumlah-jumlah koperatif dalam LRA dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat waktu. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintahan daerah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan tepat waktu.

Dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar

akuntansi pemerintahan (SAP), pasal 97 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan dalam pasal 239 peratuan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan mengacu pada SAP. (Dengan catatan peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tidak mengatur perubahan pasal 239 peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006).

Dalam melaksanakan kerja praktek, penulis ditempatkan di Bagian Keuangan Verifikasi dan Akuntansi. Oleh karena itu, penulis membuat Laporan Kerja Praktek dengan judul **"PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 02 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLAAN DAERAH (LRA SKPD) PEMERINTAH KOTA CIMAHI".**

1.2. TUJUAN

Tujuan disusunnya Laporan Kerja Praktek ini adalah untuk memberikan gambaran kepada Penulis mengenai :

1. Untuk mengetahui penerapan kebijakan akuntansi no. 02 dalam penusunan laporan realisasi anggaran satuan kerja pengelolaan daerah (LRA SKPD) pemerintah kota Cimahi.

2. Untuk mengetahui perbedaan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran SKPD sebelum dan sesudah dikonversi

1.3. KEGUNAAN KERJA PRAKTEK

A. Bagi Penulis

Penelitiaan ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbandingan yang dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta menjadi informasi dasar yang memadai tentang penerapan peraturan walikota cimahi no. 11 tahun 2009 tentang kebijakan akuntansi no. 02 tentang laporan realisasi anggaran satuan kerja pengelolaan daerah (LRA SKPD) Pemerintah Kota Cimahi.

B. Bagi Instansi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau informasi serta masukan positif bagi manajemen perusahaan yang berhubungan dengan penerapan peraturan walikota cimahi no. 11 tahun 2009 tentang kebijakan akuntansi no. 02 tentang laporan realisasi anggaran satuan kerja pengelolaan daerah (LRA SKPD) Pemerintah Kota Cimahi menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan agar mampu meningkatkan kinerjanya pada masa yang akan datang.

1.4. LOKASI DAN WAKTU KERJA PRAKTEK

Penulis telah melakukan Kerja Praktek di bagian keuangan Sekretariat Daerah Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi pemerintah Kota Cimahi yang beralamat di jalan Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang, Cimahi. Waktu kerja praktek ini dilakukan pada tanggal 1 Juli sampai dengan 5 Agustus 2010.

Tabel 1.1

Jadwal Penelitian

No	Bulan	Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November			
	Kegiatan / minggu ke-	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Memperoleh surat izin Kerja Praktek dari kampus																								
2	Mencari tempat untuk melaksanakan Kerja Praktek																								
3	Mengajukan surat permohonan Kerja																								

	Praktek ke perusahaan																								
4	Menentukan tempat Kerja Praktek																								
5	Meminta surat pengantar kepada perusahaan																								
6	Melaksanakan Kerja Paktek di perusahaan																								
7	Pengambilan dan pengumpulan data dari perusahaan																								
8	Menyiapkan laporan Kerja Praktek																								
9	Bimbingan di perusahaan																								
10	Penyusunan laporan Kerja Praktek																								
11	Bimbingan di kampus																								

12	Penyempurnaan laporan Kerja Praktek																							
13	Penggandaan laporan Kerja Praktek																							